

**LAPORAN KERJA
POKJA KAJIAN
Per tanggal 25 Januari 2007**

Report by: Alex Sihar

Sampai saat ini, presidium MFI sudah meminta pokja kajian untuk melakukan kajian mengenai:

Membuat 'daftar kesalahan' UU No.8/92. Daftar ini harus berisi poin-poin berdasarkan pasal-pasal dalam UU tersebut yang jelas-jelas tidak relevan lagi untuk saat ini. Rasionalisasi yang baik dibutuhkan untuk kita membuat positioning paper yang beralasan kuat.

Membuat 'daftar kesalahan' PP No.7 dan PP No.8. Bentuknya sama dengan yang diatas, tapi ingat!!! Kedua PP inilah yang secara praktis paling bermasalah karena menyangkut keberadaan BP2N dan LSF.

Membuat 'daftar kesalahan' RUU versi Budpar dan versi BP2N. Bagusnya kalo sudah bisa berbentuk matriks perbandingan keduanya, jadi kita bisa liat poin-poin mana aja yang jelas-jelas tidak relevan, dan poin-poin mana saja yang masih bisa kita upgrade untuk tujuan kita.

Membuat matriks perbandingan film policy/cultural policy/film law/film act dari negara-negara: Korea, Prancis, Australia, India, dan Iran. Matriks ini diperlukan agar kita bisa melihat perbedaan penekanan policy masing-masing negara, dan melihat pola seperti apa yang cocok buat kita.

Membuat matriks perbandingan cara sensor/klasifikasi dari negara-negara: Amerika, Korea, Prancis, Australia, India, dan Iran.

Mulai menyusun poin-poin untuk pembentukan RUU Klasifikasi Film.

Bikin perbandingan jenis dan fungsi asosiasi/serikat/gilda/perkumpulan untuk profesi perfilman. Dari daftar ini kita bisa melihat bentuk perkumpulan apa yang cocok untuk tiap sub-profesi perfilman nantinya.

Karena prioritas strategis, maka poin-poin yang berhubungan dengan pembentukan Lembaga Klasifikasi Film dibahas sebagai agenda utama dalam pertemuan-pertemuan pokja kajian.

Beberapa kesimpulan penting dalam rapat pokja kajian:

UU yang kita ajukan berarti UU klasifikasi film. Maka tuntutananya menjadi:

→ Cabut UU No. 8/1992

→ Buat UU klasifikasi film.

Kita harus mencari perbandingan *policy* di berbagai Negara tentang hal ini.

Asosiasi merupakan organisasi profesional yang mengurus film dan *stakeholder* utama adalah kita.

Sekarang kita membutuhkan formulasi tentang asosiasi-asosiasi ini dan kita butuh dukungan untuk mendukung ini. Langkah-langkah yang harus ditempuh:

Lobby ke pemerintah

Public campaign

Revitalisasi KFT

Membuat asosiasi pekerja film (untuk yang belum ada). Asosiasi ini lebih ke perlindungan kerja.

Pengembangan, pendidikan, dan support policy lebih ke visi kebudayaan.

Lobi ke pelaku industri.

Persiapan Kongres Masyarakat Film Indonesia dengan melibatkan para pelaku industri film sehingga concern mereka terwakili.

Membudpar harus [?] memfasilitasi Kongres ini

Catatan:

Asosiasi membawa suara anggotanya masing-masing.

Hasil diskusi tim kajian MFI harus disampaikan ke seluruh anggota.

To do list:

Presidium bertemu tim komunikasi untuk *update*.

Tim kajian melakukan riset tentang lembaga klasifikasi film. Tim kajian harus membuat *positioning paper* dan juga mempersiapkan matriks yang berisi *real fact* untuk disampaikan kepada pemerintah tentang apa yang tidak bisa dan bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tim kajian dan presidium bertemu IMPLC untuk persiapan *legal drafting*.

Presidium melobi Depbudpar.

Pleno MFI: sosialisasi asosiasi dan kongres MFI.

Presidium lobi ke pihak-pihak terkait: calon-calon asosiasi.

Kampanye publik tentang:

UU Klasifikasi Film

Kongres MFI

Fundraising.

Catatan:

UU Klasifikasi dibuat secara khusus. Isu ini akan bagus di public karena menunjukkan concern kita pada masalah 'moral'. Ini sesuatu yang penting dan kita harus menjamin tentang mekanisme yang ada di dalam lembaga LKF.

Sistem kerja asosiasi ditentukan oleh masing-masing anggota asosiasi. Tetapi kita memberikan tawaran-tawaran mekanisme.

KFT bisa saja menjadi federasi yang bersifat perserikatan sehingga bisa melakukan advokasi hak (jam kerja, standar gaji, dll).

Kampanye pembentukan asosiasi harus ditekankan pada benefitnya bagi para anggotanya.

Sampai saat ini, pokja kajian sedang dalam tahap pembentukan matriks perbandingan klasifikasi film dari beberapa negara termasuk:

Sistem Australia
Sistem AS
Sistem Korea Selatan
Sistem Singapura
Sistem China
Sistem Cheko
Sistem Thailand